

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Sistem Pengendalian Intern

###### 2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern atau *internal control* merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Mulyadi (2010:163) menyatakan bahwa:

“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Pengertian Pengendalian Intern menurut Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess dalam Aria Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik Hendrawan (2008:207), adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal (*internal control*) adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aset perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti”.

Sedangkan menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley dalam Herman Wibowo (2008:370), mengenai sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya”.

Menurut COSO ( *Committee Of Sponsoring Organization*) dalam Amin Widjaja Tunggal (2013:3), pengendalian intern adalah:

*“internal control: a process, effected by entity’s, board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objective in the following categories: effectiveness and efficiency of operations, realibility of financial reporting, compliance with appliable laws and regulations”.*

Maksud dari pengertian diatas yaitu suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didisain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

#### **2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern**

Tujuan sistem pengendalian intern berdasarkan definisi menurut Mulyadi (2010:163) adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kekayaan organisasi
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- c. Mendorong efisiensi
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Tujuan utama sistem pengendalian intern menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley dalam Herman Wibowo (2008:370), adalah sebagai berikut:

- a. Reliabilitas pelaporan keuangan
- b. Efisiensi dan efektivitas operasi
- c. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Dari tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Reliabilitas pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

- Efisiensi dan efektivitas operasi

Penegndalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. tujuan yang paling penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

- Ketaatan pada hukum dan peraturan

Seluruh perusahaan publik harus mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas peaporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum organisasi-organisasi publik, nonpublik dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan beberapa haya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU

perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berhubungan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Tujuan sistem pengendalian internal berdasarkan tujuannya menurut Mulyadi (2010:163), meliputi:

1. Pengendalian Intern Akuntansi (*Internal Accounting Control*)  
Pengendalian akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi.
2. Pengendalian Intern Administratif (*Internal Administrative Control*)  
Pengendalian administrasi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess dalam Aria Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik Hendrawan (2008:208), tujuan pengendalian internal adalah memberikan jaminan bahwa:

- a. Aset dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha.
- b. Informasi bisnis akurat.
- c. Karyawan mematuhi aturan dan ketentuan.

Uraian tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengendalian internal dapat melindungi aset dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan atau penempatan aset pada lokasi yang tidak tepat. Salah satu pelanggaran yang paling serius terhadap pengendalian internal adalah penggelapan oleh karyawan. Penggelapan oleh karyawan (*employee fraud*) adalah tindakan yang disengaja untuk menipu majikan demi keuntungan pribadi. Penipuan tersebut bisa

mengambil bentuk mulai dari pelaporan beban yang berlebihan untuk ongkos perjalanan agar mendapat penggantian yang lebih besar dari kantor hingga penyelewengan jutaan dolar melalui tipuan yang rumit.

- Informasi yang akurat diperlukan demi keberhasilan usaha. penjagaan aset dan informasi yang akurat sering berjalan seiring. Sebabnya adalah karena karyawan yang ingin menggelapkan aset juga perlu menutupi penipuan tersebut dengan menyesuaikan catatan akuntansi.
- Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta standar pelaporan keuangan. Contoh-contoh dari standar serta peraturan tersebut meliputi ketentuan mengenai lingkungan hidup, syarat-syarat kontrak, peraturan keselamatan, dan prinsip yang berlaku umum (GAAP).

Sedangkan menurut *Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standard 300), Scope of Work* dalam Amin Widjaja Tunggal (2013:4), 5 tujuan utama pengendalian intern adalah untuk:

1. Keandalan dan integritas informasi.
2. Ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan.
3. Mengamankan aktiva.
4. Pemakaian sumber daya yang ekonomis.
5. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang ditetapkan.

Sedangkan menurut *COSO* dalam Amin Widjaja Tunggal (2013:4), tujuan pengendalian intern adalah:

1. Keandalan dan integritas informasi: kompoen pengendalian “informasi dan komunikasi” secara utuh menjelaskan dan mencakup tujuan tersebut.

2. Ketaatan dengan kebijakan, rencana dan prosedur organisasi: komponen pengendalian “aktivitas pengendalian” menunjukkan bahwa penetapan dan ketaatan yang diperkuat terhadap kebijakan dan prosedur perlu untuk mempertahankan organisasi dalam jalur terhadap pencapaian tujuan.
3. Mengamankan harta, pemakaian sumber daya yang ekonomis dan efisien dan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan: ketiga tujuan tersebut secara langsung dinyatakan dalam halaman pertama *Executive Summary COSO*: “Kategori pertama (efektivitas dan efisien operasi) menyatakan tujuan utama dari entitas, termasuk kinerja dan tujuan kemampuan dan pengamanan sumber daya.

### 2.1.1.3 Unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern

Unsur- unsur sistem pengendalian intern menurut COSO dalam Amin

Widjaja Tunggal (2013:6) adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*).
2. Penaksiran Resiko (*Risk Assesment*).
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*).
4. Pemrosesan Informasi dan Komunikasi (*Information Processing and Communication*).
5. Pemantauan (*Montioring*)

Uraian dari unsur- unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan sikap manajemen puncak, direksi, dan pemilih suatu entitas tentang pengendalian intern dan pentingnya bagi entitas. Lingkungan pengendalian membentuk fondasi untuk keempat komponen pengendalian yang lain. Ketiadaan satu atau lebih unsur yang penting dari lingkungan pengendalian akan menyebabkan sistem tidak efektif, meskipun terdapat kekuatan dari

sisi empat komponen pengendalian yang lain. Terdapat tujuh faktor lingkungan pengendalian, yaitu:

1. Integritas dan nilai etis (*ethical values*).

Efektivitas pengendalian intern suatu entitas merupakan fungsi dari integritas dan nilai etis dari individu yang menciptakan, mengadministrasikan, dan memonitor pengendalian. Suatu entitas perlu menetapkan standar etis dan perilaku yang dikomunikasikan kepada karyawan dan diperkuat dengan praktik dari hari kehari. Misalnya manajemen harus memindahkan insentif atau godaan yang memungkinkan personil untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau yang tidak etis. Beberapa contoh insentif adalah mengarah pada perilaku yang tidak etis atau tekanan untuk mencapai target kinerja yang tidak realistis. Contoh godaan mencakup dewan direksi yang tidak efektif, fungsi audit intern yang lemah, dan hukum yang ringan atas perilaku yang tidak etis.

Manajemen paling baik mengkomunikasikan integritas dan perilaku etis dalam suatu entitas melalui pemakaian pernyataan kebijakan dan aturan perilaku (*policy statements, and code of conduct*). Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Banyak perusahaan telah menerapkan kode etik tertulis yang secara formal menyatakan keinginan mereka melakukan bisnis dengan perilaku yang etis.

## 2. Komitmen terhadap kompetensi

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas individual. Secara konseptual, manajemen harus menspesifikasikan tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan menjabarkan kompetensi kedalam tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Contohnya, suatu entitas harus mempunyai uraian pekerjaan (*job description*) yang formal atau tidak formal untuk setiap pekerjaan. Kemudian manajemen harus merekrut karyawan yang mempunyai kompetensi yang tepat untuk pekerjaan mereka. Kebijakan sumber daya manusia yang baik membantu menarik dan mempertahankan karyawan yang dapat dipercaya.

## 3. Partisipasi dari Dewan Komisaris dan Panitia Audit

Dewan Komisaris dan Panitia Audit secara signifikan mempengaruhi kesadaran pengendalian suatu entitas. Panitia audit merupakan subpanitia dari dewan direksi yang biasanya terdiri dari direktur-direktur yang bukan merupakan bagian dari tim manajemen. Dewan Komisaris dan Panitia audit adalah orang-orang yang terpercaya dan decara aktif mengawasi akuntansi entitas, kebijakan dan prosedur pelaporan. Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas anggota panitia audit antara lain:

- Independensi dari manajemen
- Pengalaman



- Sejauh mana keterlibatan dengan aktivitas entitas
- Ketepatan tindakan
- Sesulit apa pertanyaan yang disampaikan kepada manajemen
- Interaksi dengan auditor intern dan ekstern

Manajemen sering di bawah tekanan dari pemegang saham dan dewan komisaris untuk mempertahankan laba yang tinggi untuk perusahaan. dalam beberapa kasus, hal ini sebaliknya memotivasi manajemen memberi tekanan pada auditor untuk melanggar prinsip-prinsip akuntansi dan sebab itu mempengaruhi laba yang dilaporkan dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dewan komisaris mempunyai tanggung jawab yang lebih besar kepada pemegang saham terhadap kewajaran dalam laba yang dilaporkan.

#### 4. Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi

Menetapkan, mempertahankan, dan memonitor pengendalian intern suatu entitas merupakan tanggung jawab manajemen. Filosofi manajemen dan gaya operasi dapat secara signifikan mempengaruhi mutu pengendalian intern. Karakteristik yang seperti berikut dapat memberi isyarat informasi yang penting kepada auditor mengenai filosofi manajemen dan gaya operasi:

- 1) Pendekatan manajemen dalam mengambil dan memonitor resiko bisnis.

- 2) Sikap dari tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan (seleksi konservatif atau agresif dari berbagai prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia dan ketelitian dan konservatisme terhadap estimasi akuntansi yang dikembangkan).
- 3) Sikap manajemen terhadap pengolahan informasi, fungsi dan personil akuntansi.

#### 5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi mendefinisikan bagaimana wewenang dan tanggung jawab didelegasikan dan dimonitor. Struktur organisasi memberikan suatu kerangka kerja untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan memonitor operasi. Menetapkan suatu struktur organisasi yang relevan mencakup mempertimbangkan area kunci dari wewenang dan tanggung jawab dan lini pelaporan yang tepat.

#### 6. Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab

Faktor lingkungan pengendalian mencakup bagaimana wewenang dan tanggung jawab untuk aktivitas operasi diberikan dan bagaimana hubungan pelaporan dan hirarki otorisasi ditetapkan.

Pemberian wewenang dan tanggung jawab mencakup kebijakan yang berkaitan dengan praktik bisnis yang dapat diterima, pengetahuan dan pengalaman personil kunci, dan sumber daya yang diberikan untuk melaksanakan kewajiban. Juga termasuk kebijakan dan komunikasi yang diarahkan untuk memastikan bahwa semua personil memahami tujuan entitas.

## 7. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia

Mutu pengendalian intern merupakan fungsi langsung dari mutu personil yang menjalankan sistem. Entitas harus mempunyai kebijakan personil yang baik untuk penerimaan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, kompensasi, dan tindakan perbaikan. Contohnya, dalam menerima karyawan, standar-standar yang menekankan mencari individual yang paling berkualifikasi, dengan penekanan pada latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, dan bukti integritas dan perilaku etis yang menyatakan komitmen entitas untuk memperkerjakan orang yang kompeten dan dapat dipercaya. Riset tentang penyebab kesalahan dalam sistem akuntansi menunjukkan masalah yang berkaitan dengan manusia merupakan penyebab utama kesalahan yang tidak disengaja (A Wright, 1989). Studi A Wright menunjukkan sekitar 55% dari kesalahan yang ditemukan oleh auditor berasal dari masalah personil, pengetahuan akuntansi yang tidak memadai, dan kesalahan pertimbangan.

- Penaksiran Risiko (*Risk Assesment*)

Penaksiran resiko suatu entitas untuk pelaporan keuangan merupakan suatu identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko-resiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan yang secara wajar disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Proses penaksiran resiko harus mempertimbangkan kejadian dan keadaan ekstern dan intern yang mungkin timbul dan secara tidak baik

mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Resiko bisnis klien dapat muncul atau berubah karena keadaan-keadaan sebagai berikut:

- 1) Perubahan dalam lingkungan operasi.
- 2) Personil yang baru.
- 3) Sistem informasi yang baru atau yang berubah.
- 4) Pertumbuhan yang cepat.
- 5) Teknologi baru.
- 6) Lini, produk, atau aktivitas yang baru.
- 7) Restrukturisasi korporat.
- 8) Operasi luar negeri.
- 9) Pengumuman/ pernyataan akuntansi.

- **Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)**

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk menghadapi resiko-resiko yang tersangkut dalam mencapai tujuan entitas.

aktivitas pengendalian yang relevan terhadap audit mencakup:

1. Penelaahan kinerja (*performance appraisal*)
2. Pengolahan informasi (*information processing*)
3. Pengendalian fisik (*physical controls*)
4. Pemisahan fungsi (*segregation of duties*)

- Pemrosesan Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang relevan terhadap tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang ditetapkan untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi suatu entitas dan mempertahankan akuntabilitas untuk aktiva dan utang yang berkaitan. Suatu sistem akuntansi yang efektif memberikan pertimbangan yang tepat untuk menetapkan metoda dan catatan yang akan:

- 1) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang absah.
- 2) Menguraikan dengan tepat waktu transaksi-transaksi dalam detail yang memadai untuk memungkinkan klasifikasi transaksi yang tepat untuk pelaporan keuangan.
- 3) Mengukur nilai transaksi dalam suatu keadaan yang memungkinkan pencatatan nilai moneter transaksi tersebut secara tepat dalam laporan keuangan.
- 4) Menentukan periode-periode waktu transaksi tersebut terjadi untuk memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi yang tepat.
- 5) Secara tepat menyajikan transaksi dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan.

Komunikasi mencakup memberikan pemahaman peranan individual dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

Komunikasi meliputi sejauh mana personil memahami bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan dari yang lain.

Manual kebijakan, manual akuntansi pelaporan, dan memorandum mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada personel entitas. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau melalui tindakan manajemen.

- Pemantauan (*Monitoring*)

Untuk memberikan kepastian yang memadai bahwa tujuan suatu entitas dapat tercapai, manajemen harus memonitor pengendalian intern untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi seperti yang diinginkan dan pengendalian intern dimodifikasi agar sesuai dengan perubahan dalam kondisi.

*Monitoring* merupakan suatu proses yang menilai mutu pengendalian intern sepanjang waktu. *Monitoring* mencakup personil yang tepat untuk menilai desain dan operasi pengendalian dengan dasar yang tepat waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. *Monitoring* dapat dilakukan atas aktivitas yang sedang berjalan atau evaluasi terpisah.

Prosedur *monitoring* yang sedang berjalan dibangun dalam aktivitas yang normal dan berulang-ulang dari entitas dan mencakup aktivitas pengelolaan dan pengawasan yang rutin.

#### 2.1.1.4 Keterbatasan Pengendalian Intern

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:26), keterbatasan pengendalian intern disebabkan oleh:

1. Manajemen mengesampingkan pengendalian intern

Pengendalian suatu entitas mungkin dikesampingkan oleh manajemen. Sebagai contoh, seorang manajer tingkat senior dapat meminta seorang karyawan tingkat yang lebih rendah untuk mencatat ayat-ayat jurnal dalam catatan akuntansi yang tidak konsisten dengan substansi transaksi dan melanggar pengendalian entitas.

Karyawan yang tingkat lebih rendah tersebut dapat mencatat transaksi, meskipun ia mengetahui bahwa hal tersebut melanggar pengendalian entitas, dengan tanpa ketakutan kehilangan pekerjaannya.

Auditor khususnya harus memberi perhatian apabila manajemen senior terlibat dalam aktivitas-aktivitas seperti ini karena aktivitas tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas manajemen. Namun, pelanggaran prosedur pengendalian oleh manajemen senior mungkin sulit ditemukan dengan prosedur audit normal.

2. Kesalahan yang tidak disengaja oleh personil

Sistem pengendalian intern hanya efektif apabila personil yang menerapkan dan melaksanakan pengendalian juga efektif. Sebagai contoh, karyawan mungkin salah memahami insruksi atau membuat kesalahan pertimbangan. Karyawan juga mungkin melakukan kesalahan karena ketidakteelitian pribadi, kebingungan, atau kelelahan. Auditor harus berhati-hati mempertimbangkan mutu dari personil entitas ketika menilai pengendalian intern.

3. Kolusi

Efektivitas pemisahan fungsi terletak pada pelaksanaan individual sendiri atas tugas-tugas yang diberikan kepada mereka atau pelaksanaan pekerjaan seseorang diperiksa oleh orang lain. Sering terdapat suatu resiko bahwa kolusi antar individual akan merusak efektivitas pemisahan fungsi. Contohnya, seorang karyawan yang menrima kas dari pelanggan berkolusi dengan karyawan lain yang mencatat penerimaan dalam catatan pelanggan agar mencuri kas dari entitas.

### 2.1.2 *Good Corporate Governance*

Kata Governance berasal dari bahasa Perancis *gubernance* yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *corporate governance*. Dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan.

Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *corporate governance*. Jadi pada dasarnya *good corporate governance* adalah suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Di Indonesia, konsep *corporate governance* diperkenalkan secara resmi pada tahun 1999 ketika pemerintah membentuk Komite Nasional tentang *Corporate Governance*. Sebagaimana halnya di negara-negara lain di dunia, komite ini melahirkan kode *corporate governance*, yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Kode ini ditasbihkan sebagai referensi seluruh perusahaan Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka.



### 2.1.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Banyak para ahli memaparkan apa itu definisi dari *good corporate governance*, salah satunya adalah sebagai berikut:

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Tricker (2003) dalam Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:35) adalah:

“Tata kelola perusahaan merupakan istilah yang muncul dari interaksi diantara manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi serai pihak terkait lainnya, akibat adanya ketidak konsistenan antara “apa” dan “apa yang seharusnya”, sehingga isu tata kelola perusahaan muncul”.

Sedangkan menurut Adrian Sutedi (2011:1) *Corporate Governance* didefinisikan sebagai:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Selanjutnya menurut *The Australian Stock Exchange (ASX)* dalam Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2008:3) *corporate governance* adalah:

“*Corporate governance is the system by which companies are directed and managed. It influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performance is optimized*”.

Sesuai dengan kutipan di atas, *ASX* mengartikan *corporate governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan

perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. *Corporate governance* juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi

Sedangkan definisi *corporate governance* menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2008:3) adalah:

*“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distributions of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders, and other stakeholder, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.*

Sesuai dengan definisi di atas, menurut *OECD corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham.

Dari beberapa definisi teori yang diberikan di atas dapat dijelaskan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan intern dan ekstern perusahaan baik hak-hak dan kewajiban

masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan kepentingan para *stakeholders*.

*Good Corporate Governance* berusaha menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam *corporate governance* adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan semaksimal mungkin, sehingga tidak membebankan biaya yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas.

Untuk melaksanakan *good corporate governance* diperlukan penyusunan pedoman *good corporate governance* yang spesifik untuk masing-masing perusahaan.

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:47), pedoman pokok pelaksanaan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

- a. Visi, misi dan nilai perusahaan;
- b. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris, dan Pengawasan Internal;
- c. Kebijakan untuk memastikan terlaksanakannya efektivitas fungsi masing-masing organ perusahaan;
- d. Kebijakan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengendalian internal dan laporan keuangan;
- e. Pedoman perilaku (*code of conduct*) yang didasarkan pada etika bisnis yang disepakati;
- f. Sarana pengungkapan informasi untuk pemangku kepentingan (*public disclosure*);
- g. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip *good corporate governance*.

### 2.1.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Pendirian suatu organisasi sudah tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Apalagi menyangkut organisasi bisnis yang pastinya ada peluang untuk meraup keuntungan dari usahanya tersebut. Selanjutnya semua itu tertuang dalam visi dan misi perusahaan. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram ini dapat ercapai dengan keberadaan sistem tata kelola yang baik ata GCG (*Good Corporate Governance*).

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:38) Prinsip dasar *Good Corporate Governance* terdiri atas:

1. *Transaparansi (Transparancy)*  
Prinsip dasar, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok pelaksanaan, (1) perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya, (2) informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Anggota Dewan Komosaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, (3) prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahsiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan da hak-hak pribadi, (4) kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman pokok pelaksanaan, (1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, (2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG, (3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian intern yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. (4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

## 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangserta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

Pedoman pokok pelaksanaan, (1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws), (2) perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial dengan antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

## 4. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pokok pelaksanaan, (1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. (2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar

tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem penengndalian internal yang efektif.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaaa harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Pedoman pokok pelaksanaan, (1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai denga prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing, (2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, (3) perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender dan kondisi fisik.

### **2.1.2.3 Pihak Yang Berperan Dalam *Good Corporate Governance***

Pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri dapat didefinisikan secara luas dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur dan pemegang saham. Sedangkan, secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tersebut memliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:73), organ perseroan meliputi:

1. Rapat umum pemegang saham

Rapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Kewenangan rapat umum pemegang saham (RUPS), sebagai berikut:

- a) Menteri bertindak selaku rups dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
- b) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perseroan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- c) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang ke (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai: 1.) perubahan jumlah modal; 2.) perubahan anggaran dasar; 3.) rencana penggunaan laba; 4.) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran persero; 5.) investasi dan pembiayaan jangka panjang; 6.) kerja sama persero; 7.) pembentukan anak perusahaan atau pernyataan; 8.) pengalihan aktiva.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan ditempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicatatkan. Tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Penyelenggara RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Persyaratan

dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta rups. Setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatka risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh seua peserta RUPS.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. RUPS lainnya dapat diadakan seiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

## 2. Dewan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan unutm kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengangkatan dan pmbrehentian direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemeberhentian direksi ditetapkan oleh menteri. Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perlaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero. Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi wajib mencurahkan tenaga, pikian dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan persero. Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing persero, direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan persero



yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rancangan rencana jangka panjang yang elah ditanda tangani bersama dengan komisaris disampaikan kepada RUPS untk mendaotkan pengesahan.

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku persero ditutup, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris. Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan, harus disebutkan alsannya secara tertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan persero diatur dengan keputusan menteri.

Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: (a) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; (b) jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau (c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan persero.

### 3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh menteri.

Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Komposisi komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Masa jabatan anggota komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal komisaris terdiri atas lebih dar seorang anggota, salah seorang anggota komisaris diangkat sebagai komisaris utama. Pengangkatan anggota komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Anggota komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris diatur dengan keputusan menteri.

Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi dalam hal melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: (a) anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau (b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.2.4 Manfaat dan Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance***

Menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2008:7), menyatakan bahwa:

“Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara menyatakan penerapan *corporate governance* diperusahaan-perusahaan publik secara sehat, telah berhasil mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor dan pihak lain yang berkepentingan secara tidak transparan. Mereka juga mengutarakan *Board of Directors* perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat melakukan bimbingan kepada manajemen perusahaan mereka secara lebih efektif. *Good corporate governance* juga dapat membantu *Board of Directors* mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemiliknya”.

Sedangkan menurut Hon. Justice Owen dalam Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2008:8), menyatakan bahwa:

“Manfaat optimal *good corporate governance* tidak sama dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, bahkan pada perusahaan-perusahaan publik sekalipun. Karena perbedaan faktor-faktor intern perusahaan,

termasuk riwayat hidup perusahaan, jenis usaha bisnis, jenis resiko bisnis, struktur permodalan dan manajemennya, manfaat yang dapat diperoleh secara optimal oleh satu perusahaan belum tentu dapat diperoleh secara penuh oleh perusahaan yang lain”.

Oleh karena itu guna mencapai manfaat secara optimal, seringkali diperlukan modifikasi penerapan prinsip- prinsip *good corporate governance* dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain.

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* ini diharapkan adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2008:7), menyatakan bahwa tujuan *good corporate governance* adalah:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the *stakeholders* non-pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menurut Farid dan Siswanto dalam Irham Fahmi (2014:2) adalah:

“Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial”.

Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Sedangkan menurut Myer dalam S. Munawir (2014:5), yang dimaksud laporan keuangan adalah:

“Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi peseroan-peseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan)”.

Menurut S. Munawir dalam Irham Fahmi (2014:2), definisi laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”.

Sedangkan menurut Sofyan Assauri dalam Irham Fahmi (2014:2) pengertian laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya”.

Dengan demikian maka pihak manajemen memegang peranan penting dalam membuat laporan keuangan untuk dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan.

### **2.1.3.2 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi.

Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki laporan keuangan sebagaimana dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki 4 persyaratan normatif, yakni:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

### **2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan menurut Skousen, Stice, and Stice dalam Irham Fahmi (2014:7), adalah:

1. Kegunaan (usefulness).
2. Dapat dipahami (understandability).
3. Target audiens: investor dan kreditor.
4. Penilaian arus kas yang akan datang.
5. Mengevaluasi sumber daya ekonomi.
6. Fokus primer pada laba.

Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK (2012:3), yaitu:

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

Sedangkan menurut PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) dalam Irham Fahmi (2014:6), tujuan laporan keuangan adalah:

“Untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

#### **2.1.3.4 Komponen-komponen Laporan Keuangan**

Menurut S. Munawir (2004:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan perubahan modal. Dimana neraca menunjukkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan (laporan) rugi laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber

dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan.

Menurut Rico Lesmana dan Rudy Surjanto dalam Irham Fahmi (2014:3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-kompone berikut ini:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Modal
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Neraca, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Kondisi keuangan yang digambarkan terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas. Istilah saat tertentu ditunjukkan pada kata-kata “Per 31 Desember” yang berarti kondisi keuangan pada satu hari yaitu tanggal 31 Desember.
2. Laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha suatu perusahaan pada periode tertentu. Periode yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan umumnya 1 tahun, baik menggunakan tahun takwin maupun tahun buku. Periode tertentu biasanya dinyatakan dengan “Periode 1/1 – 31/12/20XX”. Dengan demikian jelas menunjukkan kapan awalnya dan kapan akhirnya.
3. Laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas sebuah perusahaan pada saat tertentu. Laporan

perubahan ekuitas disajikan setelah diketahui kondisi laba atau rugi perusahaan, saat tertentu dinyatakan sama dengan neraca di atas.

4. Laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan lalu lintas keuangan baik dari sisi kas masuk maupun dari sisi kas keluar. Laporan keuangan kas ini akan memberikan gambaran kepada pemakai, kapan saatnya kondisi kas surplus dan kapan saatnya defisit. Begitu juga informasi tentang dari mana saja sumber penerimaan dan pengeluaran kas.
5. Catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian dari laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan semua perkiraan yang ada dalam neraca, laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Penjelasan perkiraan-perkiraan seperti daftar pelanggan yang berutang ke perusahaan, jenis-jenis persediaan dan daftar aktiva tetap serta rincian perkiraan lainnya disajikan pada catatan atas laporan keuangan ini.

#### **2.1.3.5 Pihak-pihak yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan Suatu Perusahaan**

Menurut Irham Fahmi (2014:15) ada beberapa pihak yang selama ini dianggap memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu:

- a. Kreditur  
Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang (money), barang (goods) maupun dalam bentuk jasa (service). Contoh kreditur yang memberikan pinjaman dalam bentuk uang adalah perbankan atau *leasing*.



- b. Investor  
Investor disini bisa mereka yang membeli saham tersebut atau bahkan komisaris perusahaan. Seorang investor berkewajiban untuk mengetahui secara dalam kondisi perusahaan dimana ia akan berinvestasi atau pada saat dia sudah berinvestasi, karena dengan memahami laporan keuangan perusahaan tersebut artinya ia akan mengetahui berbagai informasi keuangan perusahaan.
- c. Akuntan Publik  
Akuntan publik adalah mereka yang ditugaskan untuk melakukan audit disebuah persahaan, dan yang menjadi bahan audit seorang akuntan publik adalah laporan keuangan perusahaan, untuk selanjutnya pada hasil audit ia akan melaporkan dan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi.
- d. Karyawan Perusahaan  
Karyawan merupakan mereka yang terlibat secara penuh disuatu perusahaan. Dan secara ekonomi mereka mempunyai ketergantungan yang besar yaitu pekerjaan dan penghasilan yang diterima dari perusahaan tempat bekerja telah begitu berperan dalam membantu kehidupannya, terutama jika karyawan tersebut telah berkeluarga.
- e. Bapepam  
Bapepam adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Bagi suatu perusahaan yang akan go public maka perusahaan tersebut berkewajiban unuk memperlihatkan laporan keuangannya pada Bapepam, dalam hal ini PT. Bursa Efek Indonesia.
- f. *Underwriter*  
Underwriter adalah penjamin emisi bagi setiap perusahaan yang akan menerbitkan sahamnya di pasar modal. Contohnya dimisalkan pada saat PT. Abadi Angkasa akan *go public* atau dengan kata lain akan menjual sahamnya kepada publik, maka PT. Bank Oriental menjadi penjamin emisinya bahwa PT. Abadi Angkasa layak untuk *go public*.
- g. Konsumen  
Konsumen adalah pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, dari sudut marketing konsumen dibagi menjadi dua tipe. Ada yang dimaksud dengan konsumen aktual dan konsumen potensial.
- h. Pemasok  
Pemasok (*supplier*) merupakan mereka yang menerima order untuk memasok setiap kebutuhan perusahaan mulai dari hal-hal yang dianggap kecil sampai yang besar yang mana semua itu dihitung dengan skala finansial.
- i. Lembaga Penilai  
Lembaga penilai disini berasal dari berbagai latar belakang seperti Good Corporate Governance, Wahana Lingkungan Hidup, majalah, televisi, tabloid, surat kabar dan lainnya yang secara berkala membuat rangking perusahaan berdasarkan klasifikasi masing-masing.

- j. Asosiasi Perdagangan  
Asosiasi perdagangan ini mencakup mulai dari KADIN (Kamar Dagang dan Industri), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan lainnya. Dimana organisasi tersebut menaungi berbagai perusahaan yang menjadi anggotanya dan setiap waktunya diadakan rapat tahunan atau berbagai pertemuan lainnya yang membahas berbagai hal yang menjadi hambatan dalam aktivitas bisnis.
- k. Pengadilan  
Laporan keuangan yang dihasilkan dan disahkan oleh pihak perusahaan adalah dapat menjadi barang bukti pertanggung jawaban kinerja keuangan dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan tersebut nantinya akan menjadi subyek pertanyaan dalam pengadilan.
- l. Akademis dan Peneliti  
Pihak akademis dan peneliti adalah mereka yang melakukan *research* terhadap sebuah perusahaan. sehingga dengan begitu kebutuhan akan informasi sebuah laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan adalah mutlak, apalagi jika nanti penelitian tersebut dipublikasikan ke berbagai jurnal dan media masa baik nasional maupun internasional.
- m. Pemda  
Pemerintah daerah atau *local government* adalah mereka yang mempunyai hubungan kuat dengan kajian seperti akan lahirnya suatu perda (peraturan daerah) yang berkaitan dengan berbagai aspek.
- n. Pemerintah Pusat  
Pemerintah pusat adalah dengan segala perangkat yang dimilikinya telah menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai data fundamental acuan untuk melihat perkembangan pada berbagai sektor bisnis.
- o. Pemerintah Asing  
Pemerintah asing merupakan pihak yang mengamati perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi disuatu negara, dimana misalnya negara tersebut saling memiliki keterkaitan dalam bentuk perjanjian dagang (*trade contract*) yang mencakup dalam berbagai bidang usaha.
- p. Organisasi Internasional  
Organisasi internasional disini seperti IMF (International Monetary Fund), WB (World Bank), ADB (Asian Development Bank), ASEAN, PBB dan lainnya. Mereka ini adalah menjadi pihak yang turut andil dalam usaha menciptakan terbentuknya tatanan dunia baru.

### 2.1.3.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi pengguna. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK (2012:5) terdapat empat karakteristik pokok yaitu:

#### 1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna.

#### 2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegakan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu.

Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pengguna ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan entitas dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan entitas bagaimana tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pengguna, seperti pembayaran deviden dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan entitas untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu berbentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditinggalkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan jika laporan pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang diungkapkan secara terpisah.

### 3. Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian resiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakikat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

### 4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus handal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithfull representation*) dari yang sebenarnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahaan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas untuk mengetahui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

#### a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi suatu peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya neraca harus menggambarkan transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, liabilitas dan ekuaitas entitas pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

Informasi keuangan umumnya tidak luput dari resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya sudah digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan aturan dan tehnik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

b. Substansi Mengungguli bentuk

Jika informasi dimasukkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau sesuai lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu entitas mungkin menjual aset pada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut. Namun demikian, terdapat persetujuan yang memastikan bahwa entitas dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aset. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi)

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikatnya serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan atau penyisihan (*provision*) berlebihan, sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan liabilitas atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan karena itu, tidak memiliki kualitas modal.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*ommision*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau meyesatkan dan karena dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari strategi relevansi.

5. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan

posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode yang sama dan untuk entitas yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pengguna harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diperlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas, membantu pencapaian daya banding.

Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi keuangan yang lebih baik. Perusahaan tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Perusahaan juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi jika ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal.

### **2.1.3.7 Keterbatasan Laporan Keuangan**

Seluruh informasi yang diperoleh dan bersumber dari laporan keuangan pada nyatanya selalu saja terdapat kelemahan dan kelemahan tersebut dianggap sebagai bentuk keterbatasan informasi yang tersaji dari laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan harus memahami dan menyadari dengan benar setiap keterbatasan tersebut sebagai sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri, walaupun kenyataannya setiap akuntan selalu berusaha memberikan informasi yang maksimal.

Menurut PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia) dalam Irham Fahmi (2014:9) sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan.
5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian; bial terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.
6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa/ transaksi dari pada bentuk hukumnya (*formalitas*) (*substance over form*)
7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

#### **2.1.4 Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu mengenai pengendalian internal dan penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan, yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Depitasari (2014)	Pengaruh Lingkungan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan elemen-elemen pada lingkungan pengendalian internal yaitu integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, gaya operasi dan filosofi manajemen, tanggung jawab dan wewenang dan struktur organisasi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan
2	Tuti Herawati (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83%
3	Yesi Denti Utami (2009)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan <i>good corporate governance</i> memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan



4	Anatia Indriyanti Rahayu (2014)	Kualitas Laporan Keuangan Diukur Oleh Efektivitas Komite Audit dan Sistem Pengendalian Internal	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif signifikan antara efektivitas komite audit dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan secara parsial efektivitas komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
5	R. Ait Novatiani (2012)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Keandalan laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh penerapan <i>good corporate governance</i> terhadap keandalan laporan keuangan
6	Diptarina Yasmeeen (2012)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur	Hasil penelitian menunjukan bahwa <i>good corporate governance</i> yang diukur dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan
7	Norlia Mat Norwani (2011)	<i>Corporate Governance Failure and Its Impact On Financial Reporting</i>	Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh

		<i>Within Selected Companies</i>	transparansi yang merupakan prinsip <i>good corporate governance</i> terhadap laporan keuangan
8	Sigid Subandono (2014)	Pengaruh Independensi, Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia
9	Farlencia Widjaja (2013)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Industri Keramik	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki implikasi manajerial atas implementasi prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> pada perusahaan industri keramik
10	Patricia Saptapradipta (2013)	Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal dan sistem pengendalian internal secara parsial dan simultan memiliki dampak signifikan yang positif terhadap pelaksanaan <i>good corporate governance</i>
11	Maria Bernandette Priscilla (2011)	Peranan Sistem Pengendalian Intern Atas Pengelolaan Persediaan Terhadap Good Corporate Governance Pada PT. Hero Supermarket	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern mempunyai peran yang cukup besar dan sejalan terhadap <i>good corporate governance</i> di PT. Hero Supermarket

12	Tantriani Sukmaningrum (2009)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah
----	-------------------------------	--	---

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut hasil penelitian Depitasari (2014) menyatakan bahwa:

Adanya sistem akuntansi yang memadai menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Lebih rinci lagi, kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai sasaran menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya hukum dan peraturan, hal ini disebut pengendalian intern, atau dengan kata lain bahwa pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi

keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mulyadi (2010:176) menyatakan bahwa:

Laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban manajemen puncak atas hasil pengelolaan terhadap kekayaan yang dipercayakan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Keandalan dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya pengendalian intern akuntansi yang berlaku dalam perusahaan. Jika pengendalian intern akuntansi dirancang dan diterapkan dengan baik oleh manajemen di dalam pengelolaan perusahaannya, maka laporan keuangan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan akan terjamin ketelitian dan keandalannya.

Tujuan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini, sehingga keyakinan yang memadai dalam pengendalian internal dapat memberikan kemungkinan tidak terjadinya salah saji material dan memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

### **2.2.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder* menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk

memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan *disclosure* secara akurat, tepat waktu dan transparansi mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Menurut hasil penelitian Diptarina Yasmeen (2012) menyatakan bahwa proses penyusunan laporan keuangan ini melibatkan pihak manajemen yang haruslah bersifat transparan dan akuntabel. Manajemen juga harus melakukan pengawasan dan menjamin tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) guna menghasilkan integritas yang baik.

Dengan terlaksananya aspek tata kelola perusahaan yang baik tersebut maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan berupa bertambahnya laba bagi perusahaan.

Menurut Adrian Sutedi (2011:2) menyatakan bahwa:

“Secara singkat ada empat komponen utama *good corporate governance* ini yaitu *fairness, transparency, accountability dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan”.

Penerapan *good corporate governance* juga dapat menghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan

### **2.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

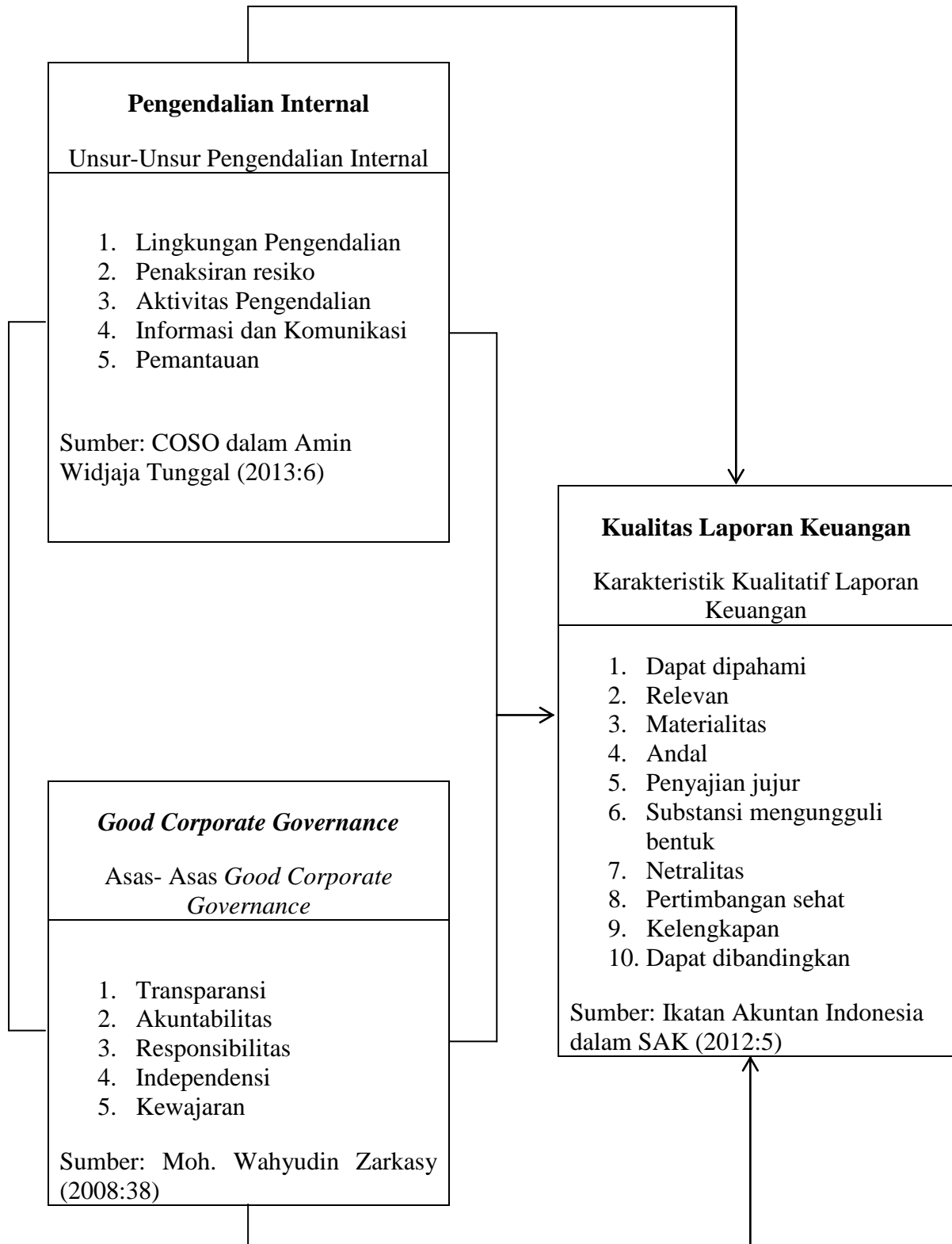
Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan yang juga tidak terlepas dari adanya prinsip-prinsip *good corporate governance* untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut penelitian Farlencia Widjaja (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal diperlukan perusahaan untuk memastikan agar prinsip-prinsip *good corporate governance* terlaksana dengan baik, khususnya pada saat ini tengah berkembang *family business*. Kerapnya terjadi tumpang tindih peran dalam *family business* membutuhkan implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* agar mampu bertahan di era globalisasi ini.

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:40) menyatakan bahwa:

“perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan”

Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya sinergi antara *good corporate governance* dengan sistem pengendalian intern yang berdampak kepada efektifitas pengelolaan perusahaan, yang berujung pada meningkatnya pendapatan perusahaan.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Suharsimi Arikunto (2002:64), adalah sebagai berikut:

“Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.

. Berdasarkan uraian diatas peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan
2. Terdapat pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan
3. Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal dan penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan.